

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Komisi D Dukung Rencana Pj Gubernur Bangun Rusun Tanjung Priuk

Gambir, Warta Kota

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif mendukung rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang ingin membangun rumah susun (rusun) baru bagi warga eks Kampung Bayam pada 2025 mendatang.

Menurutnya, rencana tersebut merupakan langkah terbaik yang bisa dilakukan Pemprov DKI untuk merelokasi warga eks Kampung Bayam yang masih bertahan di sekitar Kampung Susun Bayam (KSB).

"Itu kami patut dukung ya, karena itu kan program baru," ucap politikus senior Gerindra ini, Kamis (25/1/2024).

Kehadiran Rusun Tanjung Priuk tersebut juga disebutnya dapat menjadi solusi hunian berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebab, selama ini pembangunan rusun hanya difokuskan di daerah-daerah perbatas, seperti di Cilincing dan Penjaringan saja.

"Harga tanah yang mahal itu membuat perencanaan pembangunan rusun di wilayah timur bagian Jakarta Utara tidak pernah jalan, tapi dari barat Jakarta Utara sudah banyak," ujarnya.

"Karena itu, kalau pak Heru mau bangun rusun di Tanjung Priuk, itu good job (pekerjaan bagus)," sambungnya.

Terkait dengan KSB yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan, Syarif menyebut, konsep pembangunannya memang bukan untuk MBR.

Melainkan sebagai Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS).

Warga eks Kampung Bayam pun harus bersedia bekerja di JIS, sambil memanfaatkan lahan yang ada sebagai urban farming selama tinggal di KSB.

Belum lagi status kepemilikan lahan yang masih dipegang oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI.

Sedangkan, pihak yang membangun dan mengelola KSB merupakan BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Sehingga diperlukan waktu dan proses yang cukup panjang untuk mengalihkan aset tersebut ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).

"Waktunya nggak sebentar dan aturannya menjelaskan ada kajian, ada tim, memang prosesnya seperti itu," tuturnya.

Untuk meredam ketegangan antara warga eks Kampung Bayam dengan Pemprov DKI ataupun Jakpro, Syarif juga mengusulkan adanya keterlibatan tokoh masyarakat, seperti mantan Gubernur DKI periode 1997-2007 Sutiyoso alias Bang Yos.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI ini meyakini, sosok Bang Yos bakal dihormati dan mampu meredam polemik yang terjadi

"Perundingan perang saja bisa, cegah GAM (Gerakan Aceh Merdeka) saja bisa, masak yang begitu (polemik JIS) nggak bisa," kata Syarif. **(Tribun.Jakarta)**